

BAB I

PENDAHULUAN

Hubungan internasional telah mengalami banyak perkembangan seiring berjalannya waktu. Pada awalnya hubungan internasional hanya dilakukan oleh negara yang diwakili oleh pemerintah atau *state to state*. Lingkup kerjasama dan area pembahasannya pun hanya sebatas isu-isu *high politics*, seperti perang, konflik perbatasan, hubungan bilateral maupun multilateral.

Globalisasi telah merubah pandangan bahwa hubungan internasional tidak hanya monopoli negara bangsa (*nation state*). Perkembangan tersebut tidak hanya terbatas pada bertambahnya kontribusi aktor dalam hubungan internasional seperti *Non-Governmental Organisations* (NGO), *Multinational Corporations* (MNC), melainkan juga isu-isu yang diangkat. Isu yang diangkat pun tidak terbatas pada isu *high politics*, melainkan telah masuk isu-isu kontemporer atau *low politics*. Krisis lingkungan sebagai contohnya, merupakan salah satu isu *low politics* yang kini menjadi perhatian dunia internasional selama dua dekade terakhir. Hal ini tidak lepas dari *multiplier effect* yang ditimbulkan.

A. Latar Belakang Masalah

Kemunculan The Climate Reality Project (TCRP) sebagai organisasi lingkungan internasional dalam hubungan internasional tidak lepas dari adanya globalisasi. Globalisasi telah menciptakan fenomena baru dimana semua pihak dapat berperan dalam hubungan internasional. Disini dapat diartikan bahwa

globalisasi merupakan proses interaksi dan integrasi antar masyarakat, korporasi dan pemerintah berbagai negara. Globalisasi dapat dianggap sebagai perluasan, pendalaman, dan percepatan dari peristiwa yang ada di seluruh dunia dalam segala bidang aspek kehidupan sosial.¹ TCRP sendiri merupakan NGOs internasional yang bergerak pada isu krisis iklim. Didirikan pada tahun 2006 oleh Al Gore, Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat ke-45 dan Peraih Nobel Perdamaian, TCRP berfokus pada edukasi dan advokasi perubahan iklim.²

Dengan adanya globalisasi aktor internasional yang awalnya hanya pemerintah sebagai perwakilan negara, telah berkembang dengan masuknya *International Organisations* (IGO), *Multinational Corporation* (MNC), *Non-Governmental Organisations* (NGOs), hingga *Global Civil Societies*. Rentang jarak dan waktu sudah bukan menjadi hambatan di era global ini. Permasalahan global yang timbul, bukan hanya menjadi perhatian pemerintah melainkan juga oleh aktor non – pemerintah. Dalam menanggapi permasalahan global tersebut aktor non – pemerintah memiliki peran dalam mempengaruhi atau advokasi melalui *global movement* atau gerakan global oleh masyarakat sipil global (*global civil society*).

Selama dua dekade terakhir, NGOs sebagai salah satu aktor internasional mengalami peningkatan baik pada level lokal, nasional, dan internasional. Kemunculan NGOs ini sebagai jawaban untuk memberikan

¹ David Held, et al.. 1999. *Global Transformations*. USA: Stanford University Press. hal. 376.

² Al Gore. *Projects: The Climate Reality Project*. (Online), (<https://www.algore.com/> diakses 12 November 2015).

pelayanan bagi mereka yang membutuhkan dan melakukan advokasi serta kampanye untuk perubahan terhadap suatu kebijakan.³

Menurut Bank Dunia, keberagaman NGOs dapat didefinisikan sebagai kumpulan kelompok atau lembaga yang sepenuhnya atau sebagian besar independen dari pemerintah serta berfokus pada kemanusiaan dan koperasi dibandingkan sebatas komersialisasi. Mereka merupakan lembaga-lembaga swasta di negara industri yang mendukung pembangunan internasional, masyarakat adat yang terorganisir secara nasional maupun internasional, dan anggota kelompok-kelompok di daerah pedesaan. Termasuk didalamnya asosiasi amal dan keagamaan yang mendistribusikan dana swasta untuk pembangunan, distribusi makanan dan program keluarga berencana serta mempromosikan organisasinya. Lebih lanjut *community associations*, *water-user societies*, komunitas-komunitas kewanitaan dan *pastoral associations* juga merupakan bagian dari NGOs. Dalam definisi Bank Dunia, termasuk juga kelompok sipil yang bergerak untuk meningkatkan kesadaran dan mempengaruhi kebijakan publik.⁴

Secara umum, NGOs dapat diartikan sebagai kegiatan sukarela yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil yang terorganisir dan memiliki jangkauan baik dalam lingkup nasional, regional maupun internasional. Hampir semua NGOs memiliki area fokus yang spesifik seperti demokrasi, transparansi

³ David Lewis dan Nazneen Kanji. 2009. *Non-Governmental Organizations and Development*. New York: Routledge. hal. 1.

⁴ *How the World Bank works with Non-Governmental Organizations*. The World Bank. 1990.

pemerintahan, kebijakan pemerintah, ekonomi, perang, dan resolusi konflik. Termasuk didalamnya isu-isu kontemporer seperti kesehatan, pendidikan, hak asasi manusia (HAM), gender, penyelundupan, imigran hingga lingkungan. Dalam menjalankan programnya, NGOs mempekerjakan profesional dan analis untuk memantau isu yang menjadi fokus areanya. Tidak hanya itu, beberapa dari mereka memiliki kapabilitas untuk membuat perjanjian dan/atau mempengaruhi kebijakan.

Salah satu permasalahan yang menarik perhatian dunia beberapa dekade ini ialah isu lingkungan. Sudah bukan hal baru bahwa masyarakat dunia memiliki andil dalam menanggulangi krisis ini. Adanya permasalahan lingkungan disinyalir oleh berbagai pihak sebagai dampak dari globalisasi dan industrialisasi di abad 20.

Sejak tiga dekade terakhir, dunia semakin tidak asing lagi dengan permasalahan lingkungan global. Permasalahan lingkungan yang terjadi tidak hanya berdampak pada tingkat lokal, melainkan telah melintasi batas teritori negara bahkan benua. Menurut *Gaia theory*, semua pihak harus mengakui bahwa bumi terancam oleh perubahan lingkungan yang berasal dan dengan konsekuensi pada geografi yang luas.⁵

Cakupan dan dampak krisis iklim yang luas, telah menarik perhatian para pakar lingkungan, pemerintah hingga organisasi internasional untuk mengambil tindakan. Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) mengadakan agenda

⁵ David Held, et al. Op.Cit.

tahunan untuk membahas permasalahan lingkungan melalui *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) atau Konferensi Perubahan Iklim PBB. Dimana UNFCCC merupakan tempat bagi seluruh perwakilan pemerintah untuk membahas permasalahan perubahan iklim dan tindakan apa yang harus dilakukan.

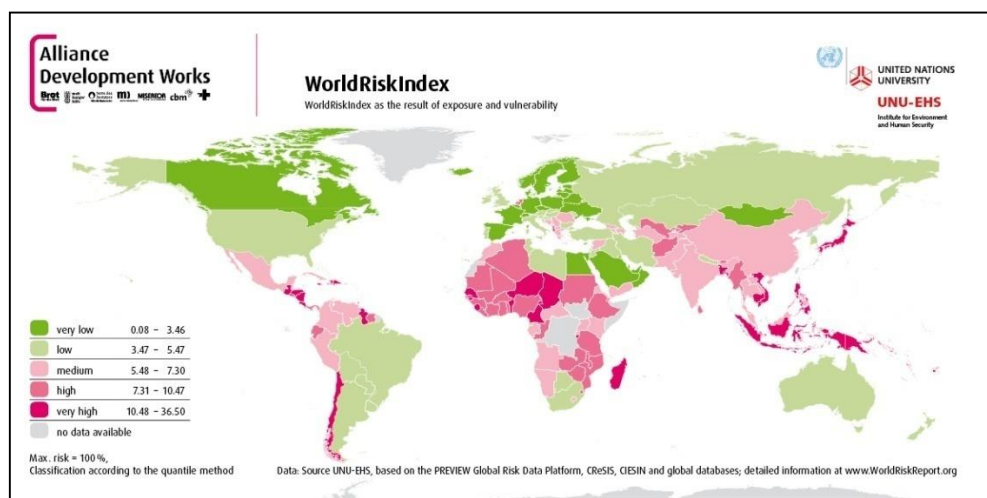
NGOs yang merupakan bagian dari aktor internasional turut serta dalam mengambil tindakan guna menanggapi krisis iklim. Mereka memiliki peran yang vital dalam *global movement*. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, TCRP yang berfokus pada lingkungan, ikut serta mengambil tindakan dalam menangani permasalahan krisis iklim. Melalui *Climate Leadership Coprs*, TCRP mengkampanyekan pentingnya untuk bertindak dalam menanggulangi krisis iklim. Sebagai NGOs internasional TCRP telah memiliki sebelas cabang di seluruh dunia yang salah satunya ada di Indonesia.

Tidak heran bila Indonesia dipilih sebagai salah satu tempat organisasi internasional untuk membuka cabang, terlebih bagi organisasi yang berfokus pada isu lingkungan. Indonesia sendiri memiliki sumberdaya alam melimpah, seperti hutan, laut dan keanekaragaman hayati. Hutan memiliki fungsi yang vital dalam penyerapan karbon sebagai solusi perubahan iklim. Akan tetapi yang terjadi, penyusutan hutan di Indonesia tergolong yang mengkhawatirkan. Sehingga perlu adanya tindakan lebih lanjut dalam menyelamatkannya. Ini tidak hanya membantu Indonesia namun juga sebagai penanggulangan krisis iklim global. Lebih lanjut, kontribusi masyarakat juga merupakan hal yang

penting. Karena degradasi hutan yang terjadi tidak lepas dari pola perilaku masyarakat yang kurang ramah lingkungan. Jumlah penduduk Indonesia yang besar merupakan kunci lain dalam mensukseskan penyelamatan lingkungan di tingkat *grass root*.

Untuk memberi gambaran tentang negara yang memiliki dampak perubahan iklim terbesar dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.1: *World Risk Index*



Sumber: UNU-EHS, based on the PREVIEW Global Risk Data Platform, CReSIS, SIESIN and global databases 2014; detailed information at www.WeltRisikoBericht.de

Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara paling rentan dampak perubahan iklim. Adapun resiko yang dihadapi seperti badai, banjir, kekeringan, hingga kenaikan permukaan air laut.⁶ Belum lagi gangguan penyakit yang ditimbulkan dan menurunnya kualitas hidup akibat

⁶ *World Risk Report 2014*. United Nations University – Institute for Environment and Human Security (UNU – EHES). Germany. 2014.

kerusakan lingkungan dan pencemaran.⁷ Sementara itu kesadaran akan pentingnya lingkungan oleh masyarakat masih rendah.⁸ Sehingga tindakan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah menjadi penting.

Tidak dapat disangkal bahwa krisis lingkungan yang terjadi saat ini, baik pada lingkup nasional maupun global, sebagian besar bersumber dari perilaku manusia. Kasus-kasus seperti pencemaran lingkungan dan penggundulan hutan contohnya. Ini merupakan akibat yang ditimbulkan dari tindakan yang tidak bertanggungjawab dari aktivitas pemanfaatan lingkungan oleh manusia. Oleh karena itu, peran manusia dalam menanggulangi krisis iklim menjadi sangat penting. Dengan jumlah penduduk lebih dari 237 juta jiwa, Indonesia mampu memberikan pengaruh yang besar dalam penyelamatan lingkungan melalui perubahan cara pandang dan perilaku terhadap alam.

TCRP dengan cabangnya di Indonesia turut melakukan upaya dalam mengedukasi masyarakat Indonesia melalui berbagai program. Program tersebut tidak hanya dijalankan oleh TCRP, melainkan juga bekerjasama dengan berbagai pihak, baik institusi pendidikan, komunitas, organisasi-organisasi hingga pemerintah. Lebih dari itu, TCRP juga memberikan perhatian khusus pada program bagi anak muda. Peran anak muda untuk menanggulangi perubahan iklim sangat dibutuhkan. Hal ini karena masa muda merupakan usia produktif. *United Nations Population Fund* (UNFPA) pada tahun 2005

⁷ Sonny Keraf. A. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas. hal. 194.

⁸ Ramadhan Aditya. *Isu Pemanasan Global Akibat Minimnya Kesadaran Masyarakat*. (Online), (<http://techno.okezone.com/read/2014/04/02/56/964261/isu-pemanasan-global-akibat-minimnya-kesadaran-masyarakat> diakses 12 Oktober 2015).

memperkirakan bahwa sekitar 1,8 miliar atau 27 persen penduduk dunia adalah kelompok usia 10 – 24 tahun. Dari jumlah tersebut 850 juta diantaranya ada di kawasan Asia dan Pasifik. Menurut Badan Pusat Statistik (2010) jumlah kelompok usia 15 – 24 tahun di Indonesia sebanyak 3.457.591 jiwa.

Adapun kerjasama yang dilakukan dengan pemerintah Indonesia, semenjak 2010 secara rutin mengirimkan utusan pemuda Indonesia ke *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) atau Konferensi Perubahan Iklim PBB. Ini dilakukan sebagai komitmen bahwa pemuda memiliki peran yang penting dalam solusi krisis lingkungan. Oleh karena itu peran aktif generasi muda dalam solusi perubahan iklim perlu dukungan dari pemerintah. Serta sejak 2011, TCRP Indonesia bekerjasama dengan pemerintah Indonesia melalui Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengadakan *Indonesia Climate Change Education Forum and Expo* (ICCEFE).⁹

Dalam memperluas jangkauan, TCRP membuka cabang diberbagai negara. Hingga kini TCRP telah memiliki 11 kantor cabang di seluruh dunia, diantaranya, Amerika Latin, Afrika, Australia, Brazil, Eropa Tengah, India, Indonesia, Inggris, Kanada, Meksiko, dan Spanyol. Meski demikian cakupan yang telah di jangkau lebih dari itu, karena *Climate Reality Leader* juga terdapat di berbagai negara di luar negara dimana kantor cabang berada. Sedangkan

⁹ *Tentang ICCEFE*. (Online), (www.iccefe.co.id/#tentang diakses 10 Oktober 2015).

kantor pusat TCRP berada di Washington, DC, Amerika Serikat.¹⁰ Salah satu agenda lain yang dijalankan oleh TCRP adalah *24 Hours of Reality*.

Dalam menanggapi krisis lingkungan yang terjadi saat ini dapat dilakukan dengan perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam. Perubahan ini tidak hanya dilakukan oleh perorangan melainkan juga budaya masyarakat secara keseluruhan. Selain itu peran pemerintah juga penting dalam mendukung berbagai kegiatan yang dilakukan oleh NGOs.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana upaya yang dilakukan *The Climate Reality Project* dalam penyelamatan lingkungan di Indonesia?

C. Kerangka Pemikiran

a. Teori Peran NGOs dalam Hubungan Internasional

Awal mula teori peran muncul dalam *foreign policy analysis* (FPA) pada tahun 1970-an. Pada saat itu para sarjanawan melakukan analisis terhadap pola perilaku negara selama Perang Dingin dalam dua kekuatan besar, bipolar. Dalam struktur tersebut memunculkan adanya posisi-posisi negara, seperti nonblok, aliansi, atau satelit.¹¹

¹⁰ *Who We Are*. The Climate Reality Project. (Online), (www.climaterealityproject.org/whoweare) pada 1 Oktober 2015).

¹¹ Holsti 1970 dalam Harnisch, et al.. 2011. *Role Theory in International Relations – Approaches and analyses: Role Theory Operationalization of Key Concepts*. New York: Routledge. hal. 7.

Studi hubungan internasional telah mengalami perubahan tidak lagi *state-centric* paradigm. Asumsi bahwa hubungan internasional merupakan hubungan *state to state* telah jauh bergeser dengan masuknya aktor non-pemerintah, khususnya NGOs. Saat ini peran dari mereka telah diperhitungkan dalam tataran hubungan internasional.

Dalam teori peran, perilaku politik yang dimiliki oleh aktor politik merupakan implementasi dari harapan yang muncul atas posisi yang dipegangnya. Disini, aktor politik diharapkan memiliki pola perilaku tertentu sesuai posisi yang didudukinya.¹² Harapan tersebut kemudian membentuk suatu peran apa yang harus dilakukan oleh aktor politik. Menurut teori ini ditegaskan bahwa peran politik merupakan perilaku dalam menjalankan peranan politik.¹³

Untuk analisis politik, teori peran memiliki dua kemampuan, menurut John Wahlke. Yang pertama yakni menunjukkan bahwa aktor politik pada umumnya berperilaku menyesuaikan dengan norma perilaku yang berlaku dalam peran yang dijalankannya. Disini perilaku yang dijalankan tergantung dan bereaksi terhadap perilaku orang lain. Kedua, teori peran memiliki kemampuan mendiskripsikan institusi secara behavioral.¹⁴ Melalui model ini, teori peran digunakan untuk menunjukkan suatu perilaku dalam berkegiatan dipandang sebagai suatu institusi. Sehingga menjembatani antara pendekatan

¹² Mohtar Mas'ood. 1989. *Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis dan Teorisasi*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Studi Sosial Universitas Gajah Mada. hal. 44.

¹³ Heinz Eulu dikutip dalam Alan Isaak. 1981. *Scope and Methods of Political Science*, Homewood III Dorsey. hal. 254 dalam Mas'ood, Mohtar. 1989. *Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis dan Teorisasi*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas - Studi Sosial Universitas Gajah Mada. hal 44.

¹⁴ Ibid, hal. 45.

individualistic dengan pendekatan kelompok. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa institusi merupakan serangkaian peran yang saling berkaitan dalam mengorganisasikan dan mengkoordinasikan sebuah perilaku untuk mencapai tujuan tertentu.

Pandangan lainnya, peran merupakan posisi sosial yang terbentuk atas ego dan mengubah harapan atas tujuan aktor dalam sebuah kelompok yang terorganisir.¹⁵ Fungsi kedudukan yang diperoleh tersebut memiliki batasan dalam waktu dan ruang lingkup, yang mana ini tergantung pada struktur dan tujuan dari kelompok tersebut. Sedangkan peran pokok beberapa kelompok seperti pengakuan dari komunitas internasional dipandang sebagai penyeimbang atau inisiator.

Lebih lanjut NGOs memiliki peran dalam pembangunan, dari menjalankan program bantuan (*logistic management*) beralih kepada bantuan untuk pembangunan (*strategic management*), saling tergantung satu dengan lainnya dalam komunitas global, dan menginisiasi isu.¹⁶

Peran NGOs dalam hubungan internasional selanjutnya dibagi menjadi:

1. Peran diskursif/mainstreaming, yaitu kemampuan dalam membuat isu minor menjadi isu sentral;

¹⁵ Thies 2010: 6336 dan Andrews 1975: 529 dalam Harnisch, et al.. 2011. *Role Theory in International Relations – Approaches and analyses:Role Theory Operationalization of Key Concepts*. New York: Routledge. hal. 8.

¹⁶ Ibid.

2. Peran kontrol, melakukan pemantauan atas kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah;
3. Peran regulatif, NGOs berperan dalam mempengaruhi atau berkontribusi dalam pembuatan sebuah kebijakan atau regulasi pemerintah.^{17 18}

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa sebagai bagian dari aktor politik, NGOs memiliki perannya sendiri dalam hubungan internasional. Jika NGOs mampu menjalankan tugas sesuai perannya, maka dapat dikatakan berhasil sebagai bagian dari komunitas internasional dengan menjalankan perannya dengan baik.

Lebih lanjut seperti apa yang dikemukakan oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB. Boutros Ghali (1995). Boutros mengemukakan lebih spesifik tentang peran NGOs dalam hubungan internasional:

“Non-governmental organizations are a basic element in the representation of the modern world. And their participation in international organizations is in a way a guarantee of the latter’s political legitimacy... From the stand point of global democratization, we need the participation of international public opinion and the mobilizing powers of non-governmental organizations.”¹⁹

¹⁷ Ben Davis. 2007. *Advocacy NGOs, Transnationalism and Political Space – An Indonesian Case Study*. Department of Indonesian Studies. Australia: The University of Sidney.

¹⁸ Ade Marup Wirasenjaya. 2014. *NGOs Sebagai Aktor Baru dalam Politik Global* disajikan dalam mata kuliah Kajian LSM Internasional. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

¹⁹ Tony Koehn. *What is a NGO?*. AGSM 653.

Dari apa yang dikemukakan oleh Boutros Ghali, dijelaskan bahwa NGOs merupakan elemen dasar dalam representasi dari dunia modern. Kontribusi NGOs pada hubungan internasional kemudian dipandang sebagai jaminan dalam legitimasi politik. Selain itu, Partisipasi publik internasional dan kemampuan NGO untuk memobilisasi sangat diperlukan dalam demokrasi.

Apa yang dilakukan oleh TCRP Indonesia merupakan cerminan dari peran sebagai organisasi yang peduli terhadap lingkungan dan keberlanjutan. Dalam mencapai tujuan tersebut, melalui program yang dijalankan, TCRP Indonesia melakukan edukasi dan advokasi.

Dari apa yang dilakukan, TCRP Indonesia mampu memberikan pengaruh bagi pihak lain namun bukan mengontrol, serta mampu bekerjasama dengan sumber daya yang ada guna menanggapi krisis iklim. Kerjasama yang dilakukan tidak sebatas pada *grass root* melainkan juga dengan pemerintah. Sehingga proyek yang dijalankan dapat sejalan dengan sistem pembangunan nasional.

Oleh karena itu, kesuksesan NGO dalam konsep ini dapat dilihat dari bagaimana kemampuan memposisikan diri dalam hubungan dengan sistem yang menjadi targetnya. Seperti yang dilakukan oleh TCRP Indonesia yang menempatkan diri sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Melakukan advokasi dengan pemerintah sekaligus edukasi kepada masyarakat.

b. *Three Generations of NGO Development Program Strategy*

NGOs merupakan aktor yang memiliki bentuk unik karena kemampuannya dalam mempengaruhi dan memobilisasi. Menurut David C. Korten dalam menjelaskan perannya, NGOs dibagi menjadi tiga generasi.

Tabel 1.1: *Three Generations of NGO Development Program Strategy*

	<i>Generation</i>		
	<i>First</i>	<i>Second</i>	<i>Third</i>
<i>Defining structures</i>	<i>Relief and welfare</i>	<i>Small-scale self-reliant local development</i>	<i>Sustainable systems development</i>
<i>Problem definition</i>	<i>Shortages of goods and services</i>	<i>Local inertia</i>	<i>Institutional and policy constraints</i>
<i>Time frame</i>	<i>Immediate</i>	<i>Project life</i>	<i>Indefinite long-term</i>
<i>Spatial scope</i>	<i>Individual or family</i>	<i>Neighborhood or village</i>	<i>Region or nation</i>
<i>Chief actors</i>	<i>NGO</i>	<i>NGO + beneficiary organizations</i>	<i>All public and private institutions that define the relevant system</i>
<i>Development education</i>	<i>Starving children</i>	<i>Community self-help initiatives</i>	<i>Failures in interdependent system</i>
<i>Management orientation</i>	<i>Logistic management</i>	<i>Project management</i>	<i>Strategic management</i>

Sumber: David C. Korten, National Association of Schools of Public Affairs and Administration, *Third Generation NGO Strategies: A Key to People Centered Development*.²⁰

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa generasi pertama merupakan organisasi yang menyediakan bantuan mitigasi bagi yang membutuhkan. Ini dilakukan dengan pelayanan dalam bentuk barang atau jasa. Melalui bantuan

²⁰ David C. Korten. 1987. *Third Generation NGO Strategies: A Key to People Centered Development*, World Development 15. National Association of Schools of Public Affairs and Administration. Great Britain: Pergamon Journals Ltd.. hal. 148.

ini permasalahan yang dihadapi dapat segera terselesaikan dengan mudah. Adapun bentuk bantuan seperti menyediakan bantuan makanan ketika terjadi gagal panen atau mensuplai air bersih di wilayah yang dilanda kekeringan. Namun masalah tersebut tidak lantas terselesaikan begitu saja, karena ketika program yang dijalankan oleh NGOs berakhir, masalah tersebut kembali melanda dan harus dihadapi sendiri oleh masyarakat.

Generasi kedua adalah organisasi yang bertujuan untuk pengembangan masyarakat. Pada generasi ini lebih berfokus untuk membantu masyarakat dalam mengentaskan permasalahan melalui kemampuan mereka sendiri. Adapun bantuan yang dilakukan berupa pelatihan. Sebagai contoh bantuan yang dilakukan ialah pelatihan petertaniann dan peternakan di wilayah terpencil, sehingga masyarakat didaerah tersebut mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Meski demikian. Pada generasi ini masih terdapat kendala yang pada umumnya menyangkut politik. Kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat lebih karena kebijakan yang dikeluarkan pemerintah lokal. Kebijakan tersebut lebih berpihak kepada kelompok tertentu seperti pengusaha. Sehingga cukup sulit bagi masyarakat untuk melawan kekuatan tersebut.

Pada generasi ketiga merupakan jawaban dari generasi sebelumnya. Korten, menjelaskan bahwa generasi ini berfokus pada konsep, ideologi, dan pengembangan strategi alternatif. Maka dapat dikatakan generasi ini merupakan generasi transformasi. Jika di generasi sebelumnya hanya berfokus pada isu lokal, maka di generasi ini masalah yang dihadapi jauh lebih besar dan lebih luas. Selain itu masalah yang dihadapi juga melibatkan peran serta aktor global

atau lembaga. Jadi dapat disimpulkan bahwa generasi ketiga merupakan penjelasan dari generasi pertama dan kedua tanpa adanya hambatan. Lebih lanjut, dalam melaksanakan upaya jangka panjang dilakukan dengan mempengaruhi kebijakan dan sisi politik lainnya.

Dari penjelesan diatas maka dapat diketahui bahwa peran dan upaya yang dilakukan oleh TCRP dapat dimasukkan kedalam kategori ketiga. Dimana TCRP melakukan upaya penyelamatan lingkungan melalui berbagai lapisan masyarakat, mulai dari tingkat akar rumput hingga pemerintah lokal dan badan internasional. Cakupan area yang dilakukan pun sudah dalam taraf global. Sehingga generasi ketiga sesuai dengan NGOs ini, sebab dalam konteks TCRP memecahkan masalah krisis iklim tidak cukup hanya dengan menanam pohon melainkan juga melibatkan berbagai pihak termasuk *stakeholder*.

D. Hipotesa

The Climate Reality Project sebagai organisasi internasional yang berfokus pada isu krisis iklim melakukan upaya penyelamatan lingkungan di Indonesia melalui:

Pertama, TCRP menjalankan peran diskursif melalui pembentukan *Climate Reality Leader* (CRL) dan *Inconvenient Youth* (IY) sebagai bentuk edukasi perubahan iklim kepada masyarakat. CRL dan IY berasal dari berbagai latar belakang sehingga mampu menjangkau berbagai kalangan.

Kedua, TCRP bekerjasama dengan pemerintah Indonesia melakukan proses internasionalisasi isu perubahan iklim melalui pengiriman utusan resmi pemuda Indonesia ke *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) atau Konferensi Perubahan Iklim PBB.

E. Jangkauan Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan penetapan pembahasan topik penelitian. Pembahasan ini digunakan agar penelitian yang dilakukan dapat lebih fokus dan mengarah pada objek permasalahan. Dalam penulisan skripsi ini peneliti akan membatasi permasalahan pada proses penyelamatan lingkungan di Indonesia setelah berdirinya *The Climate Reality Project* pada tahun 2009 hingga tahun 2015 ketika menjalankan program kerjasama yang dilakukan dengan masyarakat dan pemerintah.

F. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, digunakan metode pengumpulan data kualitatif. Melalui metode ini memungkinkan peneliti memperoleh data melalui kajian pustaka, seperti informasi dan data yang diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar, dokumen pemerintah, dan laporan yang diterbitkan oleh organisasi atau institusi terkait.

G. Sistematika

Penulisan skripsi akan dibagi ke dalam lima bab, ini dimaksudkan agar permasalahan yang diangkat dapat dibahas secara teratur, sistematis dan koheren. Maka, sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang meliputi alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Problem Lingkungan di Negara Berkembang

Pada bab ini, akan diulas mengenai dampak dari pembangunan dan industrialisasi bagi lingkungan serta respon global terhadap kerusakan lingkungan

Bab III : Program The Climate Reality Project dalam Penyelamatan Lingkungan di Indonesia

Bab III akan menjelaskan program TCRP dalam menyebarkan pengetahuan lingkungan. Dimana melalui program *Climate Reality Leadership Corps*. TCRP mengedukasi masyarakat. Selain itu juga melalui proyek – proyek yang dijalankan oleh *Climate Reality Leader* dan *Inconvenient Youth*.

Bab IV : Memperkuat Gerakan melalui Advokasi dengan Pemerintah

Bab ini mengulas tentang hubungan kerjasama TCRP dengan pemerintah Indonesia. Ini sebagai bentuk advokasi yang dilakukan oleh organisasi internasional dengan pemerintah dimana cabang TCRP berada.

Bab V : Kesimpulan

Bab ini merupakan bagian akhir dari rangkaian skripsi. Pada bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi dari hasil *library research* dalam penyusunan skripsi ini.